



EDISI SELASA 24 FEBRUARI 2026

LENTERA

Inspirasi Perubahan

H A R I A N

03

POLITIC
Polemik Mutasi Empat Dokter Spesialis Anak
IDAI Desak Setop Intimidasi Dokter, DPR Ingatkan Menkes soal Keadilan

04

NUSANTARA
Sinyal Kenaikan Iuran BPJS Menguat: Para Menteri Satu Suara

10

LISTSTYLE
Catat! Beda Cara Keringkan Sepatu Kulit dan Sneakers

Isu penutupan jaringan ritel modern demi Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih beredar luas setelah potongan pernyataan dalam rapat kerja parlemen disebarkan tanpa konteks. Narasi itu mengaitkan dukungan parlemen terhadap penghentian operasional minimarket di desa sebagai kebijakan resmi negara. Klarifikasi datang beruntun dari parlemen dan pemerintah, yang menegaskan tidak ada keputusan penutupan gerai ritel modern. Legislator DPR RI, pun langsung ramai-ramai menyangkalnya. Ditegaskan, tidak ada keputusan ataupun rekomendasi resmi untuk menutup minimarket. Pernyataan yang sempat muncul dalam forum kerja disebut sebatas wacana diskusi, bukan kebijakan legislasi. Dari sisi eksekutif, Kementerian Koperasi dan UKM menekankan fokus pemerintah pada penataan dan pengaturan ritel modern, bukan penghentian operasional. Wacana yang mencuat hanya diperbolehkan masuk hingga kota kecamatan. Program penguatan koperasi desa diarahkan berjalan berdampingan dengan pelaku usaha yang ada, termasuk jaringan ritel modern. Data menyebut, per Februari 2026, jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang telah disahkan kelembagaannya mencapai 80.081 unit. Sementara, jumlah minimarket di Indonesia didominasi oleh dua pemain besar, yaitu Indomaret dan Alfamart, dengan total gabungan mencapai lebih dari 45.000 gerai. BACA HAL 11...

KOPERASI MERAH PUTIH VS MINIMARKET (PER FEBRUARI 2026)

KOPERASI DESA DAN KELURAHAN MERAH PUTIH

Disahkan kelembagaannya
80.081 unit

Selesai dibangun (fisik)
1.000 unit
(per 18 Feb 2026)

Berstatus badan hukum
82.769 unit

Desa: **74.173 unit**
Kelurahan: **8.594 unit**

Target operasional Maret-April 2026
25.000-30.000 unit

Dalam percepatan pembangunan
29.000 unit
(target Mei 2026)

ISU LIAR MINIMARKET DITUTUP DEMI KOPDES

Pemerintah-Parlemen Kompak Menepis: Hoaks dan Tendensius

MINIMARKET

Total Indomaret + Alfamart:
>45.000 gerai

Indomaret

Gerai:
>24.141 unit
(Juni 2025)

Target tambah 2025:
1.000 gerai

Alfamart

Gerai:
>21.120 unit
(Jan 2026)

Cabang:

34 kantor

Tambahan 2025

1.081 gerai

Target tambah 2026

800 gerai

Catatan

Total minimarket nasional (2021)
38.323+ gerai

Termasuk pemain lain seperti
Lawson, FamilyMart, Circle K

Tren: terus bertambah hingga
pelosok daerah

Sumber:
Badan Pusat Statistik



KOPERASI

MERAH PUTIH

KELURAHAN MANGASA MAKASSAR

Pekerja menyelesaikan
pembangunan Koperasi Merah
Putih di Kelurahan Mangasa,
Makassar, Sulawesi Selatan,
Jumat (06/2/2026). (dok. ant)



Buntut Gaduh Beasiswa LPDP 44 AWARDEE MASUK DAFTAR HITAM, PEMERINTAH TAGIH PENGEMBALIAN DANA DAN BUNGANYA

Gara-gara pernyataan Dwi Sasetyaningtyas yang viral, pemerintah bereaksi keras. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menagih kembali dana beasiswa beserta bunganya, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan sanksi blacklist--di tengah temuan puluhan awardee yang belum pulang menunaikan kewajiban pengabdian.. Di saat yang sama, otoritas fiskal mengungkap temuan puluhan alumni yang belum kembali ke Tanah Air, sebagian di antaranya telah dijatuhi sanksi.

Pelaksana tugas Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada Kementerian Keuangan, Sudarto, menyebutkan dari penelusuran terhadap lebih dari 600 awardee Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, sebanyak 44 orang tercatat belum kembali untuk menjalankan kewajiban pengabdian di Indonesia. Delapan di antaranya telah dikenai sanksi, sementara 36 lainnya masih dalam proses.

"Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 awardee, dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya termasuk pengembalian itu 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses," ujar Sudarto dalam konferensi pers APBN KITA di Jakarta, Senin (23/2/2026).



Data itu, kata dia, dihimpun dari perlintasan keimigrasian serta laporan masyarakat. Sebagian penerima masih berada dalam masa magang, sebagian lain telah menyelesaikan kewajiban pengabdian atau memperoleh penugasan dari instansi asal.

Namun bagi yang terbukti

melanggar kontrak, sanksi bersifat finansial dan administratif: pengembalian dana beasiswa berikut bunga, serta pemblokiran akses ke program pemerintah berikutnya.

"Ada pun sanksi ya, ini semua awardee di LPDP pasti paham. Karena dia pegang buku pedoman dan dia

ATURAN KEMBALI DAN GANTI RUGI LPDP

1. Aturan Wajib Kembali

- **Waktu:** Harus pulang maksimal 90 hari setelah lulus.
- **Durasi Pengabdian:** Rumus $2n+1$ (misal: kuliah 2 tahun, wajib di Indonesia selama 5 tahun).
- **Izin Luar Negeri:** Kerja/magang di luar negeri maksimal 2 tahun dengan izin tertulis, tapi wajib pulang setelahnya.

2. Aturan Ganti Rugi (Refund)

- **Pelanggaran:** Tidak pulang, pindah warga negara, atau merusak nama baik Indonesia.
- **Yang Dibayar:** Seluruh dana yang pernah diterima (uang kuliah + uang saku) wajib dikembalikan ke kas negara.
- **Sanksi Tambahan:** Nama masuk Blacklist (daftar hitam) dari seluruh program pemerintah

Sekjen Golkar: Dinikmati Orang Kaya Saja

BEASISWA LPDP tengah menuai kontroversi akibat ucapan kontroversial dari alumni berinisial DS. Berbuntut panjang, publik mulai memberikan kritik pada beasiswa tersebut.

Salah satu kritik datang dari Sekjen Partai Golkar Msarmuji. Sarmuji menilai persyaratan LPDP membutuhkan evaluasi lantaran syarat-syarat pendaftaran hanya bisa dipenuhi oleh orang kaya.

"Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja," kata Ketua fraksi partai Golkar DPR RI, Sarmuji, Senin (23/2/2026).

Sarmuji mencontohkan syarat TOEFL atau kemampuan bahasa Inggris dalam pendaftaran LPDP. Menurutnya, syarat tersebut lebih menguntungkan orang kaya karena bisa membeli fasilitas pendidikan dan tes bahasa Inggris yang baik kepada anak-anaknya.

"Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya," tutur Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu.

Sekjen Golkar itu mengatakan standar akademik dan bahasa asing sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial-ekonomi seseorang. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses yang lebih besar atas syarat tersebut.

"Orang kaya yang bisa menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus. Orang kaya yang bisa menguruskan anaknya bahasa Inggris di tempat yang bagus. Kalau orang miskin tidak bisa. Mau gimana orang sekolahnya sambil jualan pentol. Tidak bisa," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sarmuji mengatakan banyak kelompok yang tak bisa memenuhi syarat LPDP saat ini karena keterbatasan struktural.

Menurutnya, syarat beasiswa LPDP harus mengutamakan kemampuan akademik. Kemudian kemampuan bahasa di negara tujuan beasiswa ditingkatkan seiring proses belajar.

"Yang utama itu potensi akademiknya, apakah dia mampu mengikuti pembelajaran yang berat. Soal bahasa itu bisa di-upgrade. Negara bisa hadir membantu. Tapi kalau dari awal yang bisa memenuhi hanya mereka yang memang sejak kecil sudah difasilitasi dengan sekolah dan kursus terbaik, ya akhirnya yang menikmati itu-itu saja," katanya.

Sarmuji berharap polemik yang berkembang saat ini tidak berhenti pada kecaman personal. Dia mengatakan hal ini harus menjadi momentum perubahan LPDP.

"Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik," ujar Sarmuji. (ist,wid,kum/dya)

tanda tangan perjanjian di sana. Mengembalikan dana yang disampaikan oleh pak menteri termasuk bunga tadi, dan juga pemblokiran untuk mengikuti kegiatan selanjutnya," kata Sudarto.

Di tengah temuan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah yang lebih keras terhadap kasus lain yang mencuat di ruang publik. Ia memastikan suami seorang alumni berinisial DS akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterima, lengkap dengan bunganya.

"Jadi, bos LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia seperti ini sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP, termasuk bunganya," ujar Purbaya.

Ia menyayangkan pernyataan kontroversial DS yang viral setelah mengunggah video mengenai kewarganegaraan anaknya di Inggris. Dalam rekaman itu, DS memperlihatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris, serta mengungkapkan keinginan agar anak-anaknya tidak menjadi WNI. (wid,kum,ist/dya)

Polemik Mutasi Empat Dokter Spesialis Anak IDAI DESAK SETOP INTIMIDASI DOKTER, DPR INGATKAN MENKES SOAL KEADILAN

Sejumlah organisasi profesi dan anggota DPR menyoroiti kebijakan mutasi hingga pemberhentian dokter spesialis anak oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia. Kritik datang berlapis, dari tuntutan penghentian intimidasi terhadap profesi, desakan pemulihan status dokter yang dimutasi, hingga peringatan agar kewenangan administratif tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

Ini masa polemik pemecatan dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A(K)

- o April 2025: Dr. Piprim menerima surat mutasi dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke RSUP Fatmawati. Ia menilai proses mutasi ini mendadak, tidak transparan, dan merupakan bentuk "hukuman" atas sikap kritisnya terhadap kebijakan Kemenkes.
- o Mei - Agustus 2025: Dr. Piprim secara terbuka menyatakan keberatan dan menegaskan tidak akan pindah ke RS Fatmawati. Kemenkes tetap memberikan himbauan agar ia bertugas di tempat yang baru.
- o Januari - Februari 2026: Terjadi akumulasi ketidakhadiran (mangkir) dr. Piprim di tempat tugas barunya (RSUP Fatmawati). Menurut Kemenkes RI, ia tercatat tidak masuk kerja selama lebih dari 28 hari kerja berturut-turut.
- o 15 Februari 2026: Dr. Piprim mengumumkan melalui media sosial pribadinya bahwa ia telah resmi dipecat sebagai ASN oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
- o 16 - 17 Februari 2026: Kemenkes dan Dirut RS Fatmawati memberikan klarifikasi bahwa pemecatan dilakukan sesuai prosedur disiplin PNS karena pelanggaran berat (absen kerja), bukan karena perbedaan pendapat soal kolegium.



Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menilai kebijakan mutasi sepihak terhadap empat dokter spesialis anak menciderai profesionalisme kedokteran. Perwakilan IDAI Cabang Lampung, dr. Ferdiansyah, Sp.A, M.Kes, menyebut

tindakan tersebut sebagai bentuk kesewenang-wenangan birokrasi terhadap pengurus inti organisasi..

"Tindakan pemberhentian dan mutasi terhadap keempat dokter tersebut menciderai prinsip profesionalisme kedokteran dan

dr Piprim Klaim Dua Wamenkes Akui Mutasinya Bermasalah

Piprim, Senin (23/2/2026).

Menurut dia, pokok persoalan terletak pada mens rea atau niat di balik keputusan mutasi. Ia menegaskan keberatan tersebut bukan diarahkan kepada para wakil menteri, melainkan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama pejabat struktural kementerian yang menerbitkan surat keputusan. Piprim bahkan menyebut proses itu sebagai "premanisme birokrasi".

Dalam konferensi pers di Jakarta, Piprim menuturkan polemik bermula dari terbitnya surat mutasi pada Mei tahun lalu. Ia mengklaim Wakil Menteri Kesehatan Dante menyatakan penyesalan atas kebijakan tersebut, sementara Benyamin juga menyampaikan pandangan serupa saat berkunjung ke IDAI. Menurut Piprim, sikap dua wakil menteri itu menunjukkan tidak semua pejabat tinggi Kementerian Kesehatan berada di balik keputusan

mutasi.

Piprim mengakui menolak mengikuti proses administratif lanjutan setelah mutasi diterbitkan. Sikap itu, kata dia, memicu penerapan sanksi disiplin ASN hingga berujung pada pemberhentian. Ia juga membantah tuduhan mangkir dari RSUP Fatmawati dan menyatakan tetap bekerja di RSCM hingga akses BPJS-nya diputus pada Oktober.

Upaya hukum telah ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima, namun Piprim menyatakan telah mengajukan banding.

"Keputusan PTUN itu gugatan saya tidak diterima. Bukan ditolak ya, tidak diterima. Kata pakar hukum kalau ditolak itu enggak ada harapan. Tapi kalau tidak diterima itu masih bisa banding. Dan memang saya banding," ujarnya. (tir, isa, rls/dya)

merupakan bentuk kesewenang-wenangan birokrasi terhadap para pengurus inti IDAI," ujarnya dalam pembacaan pernyataan sikap bersama di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Empat dokter yang dimutasi dan diminta dipulihkan statusnya ialah Piprim Basarah Yanuarso, Hikari Ambara Sjakti, Fitri Hartanto, serta Rizky Adriansyah. IDAI menilai persoalan tersebut berkaitan dengan independensi kolegium kedokteran.

Perwakilan IDAI Cabang DKI Jakarta, Prof. Dr. dr. Rismala Dewi, Sp.A, Subsp. E.T.I.A(K), mengingatkan pemerintah wajib mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XXII/2024. "Kolegium harus dikembalikan sebagai badan otonom yang independen dalam menjaga standar pendidikan dan kompetensi, bebas dari intervensi kekuasaan eksekutif atau Kementerian Kesehatan," katanya.

IDAI juga menuntut pembubaran Majelis Disiplin Profesi bentukkan kementerian. Perwakilan IDAI Cabang Papua, dr. Sri Riyanti, Sp.A, Subsp. Neo(K), meminta pengawasan etika profesi dikembalikan ke kelompok keahlian sesuai putusan MK Nomor 182/PUU-XXII/2024.

"Hentikan segera proses kriminalisasi terhadap dr. Ratna Setia Asih, Sp.A. Kami menyerukan agar kasus kriminalisasi dokter tidak boleh lagi terjadi kepada dokter di Indonesia," ujarnya.

Soal kebebasan berpendapat, perwakilan IDAI Cabang Sulawesi Tengah, dr. Amsyar, Sp.A, meminta pemerintah tidak membungkam kritik tenaga medis. "Hentikan segala bentuk ancaman, tekanan, dan pembungkaman terhadap dokter anak yang menyuarakan kritik konstruktif. Dokter dan organisasi profesi seperti IDAI adalah Mitra Kritis yang Sinergis bagi Pemerintah dan Masyarakat," katanya.

Sorotan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengkritik kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait pemberhentian Piprim dari posisinya sebagai dokter anak di RSUP Fatmawati setelah sebelumnya dimutasi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Ia mengimbau penggunaan kewenangan dilakukan secara proporsional.

"Saya juga menghimbau agar Menkes lebih berhati-hati dan tidak semena-mena dalam melakukan mutasi pegawai, jangan karena seseorang bersikap kritis lalu yang bersangkutan dipindah sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan," kata Yahya.

Ia menyarankan Piprim menempuh jalur hukum jika tidak menerima keputusan tersebut. "Saran saya kalau yang bersangkutan tidak menerima dengan keputusan Menkes ada langkah hukum yang harus ditempuh untuk menggugat ke PTUN. Itulah jalan demokrasi dan keadilan di negara hukum yang dijamin oleh UU," ujarnya. (gus, ist, kum/dya)

KETUA Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menyatakan dua wakil menteri kesehatan mengakui adanya persoalan dalam proses mutasi dirinya dari RS Cipto Mangunkusumo ke RSUP Fatmawati—kebijakan yang kemudian berujung pada pemecatan statusnya sebagai aparatur sipil negara. Piprim mengatakan pengakuan itu disampaikan oleh Dante Saksono Harbuwono dan Benyamin Paulus Octavianus dalam komunikasi terpisah.

"Yang saya permasalahan itu niat mutasinya kan nggak benar. Kemudian saya melawan dengan menganggap bahwa mutasi itu tidak ada, oleh karena itu saya menolak seluruh proses selanjutnya. Di situlah kemudian diterapkan peraturan disiplin ASN. Kalau aturan itu diterapkan, ya pasti kena bisa sampai pemecatan," ujar

SINYAL KENAIKAN IURAN BPJS MENGUAT: PARA MENTERI SATU SUARA

Pemerintah menguatkan sinyal kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Budi Gunadi Sadikin dan Muhaimin Iskandar menyatakan sikap sejalan, dengan argumen utama menutup defisit dan menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut iuran jaminan kesehatan perlu segera disesuaikan karena defisit dana BPJS Kesehatan terus melebar. Pada 2025, defisit dilaporkan melampaui Rp 20 triliun.

"Artinya apa? Iuran memang harus naik. Enggak mungkin iuran BPJS tidak disesuaikan setiap lima tahun," kata Budi dalam konferensi pers Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia mengemukakan dua alasan utama. Pertama, biaya kesehatan meningkat setiap tahun akibat inflasi. Tanpa penyesuaian iuran, tekanan terhadap sistem kesehatan nasional akan semakin besar. Data yang dipaparkan menunjukkan biaya jaminan kesehatan nasional naik dari Rp 158 triliun tiga tahun lalu menjadi Rp 175 triliun pada 2024 dan Rp 190 triliun pada 2025.

Kedua, perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan mendorong kenaikan beban pembiayaan. Tanpa penyesuaian iuran, pemerintah memperkirakan kemampuan negara membiayai layanan kesehatan akan terganggu dalam lima tahun ke depan. "Bukan di zaman saya, tapi pada saat menteri sesudah saya. Saya jamin BPJS tidak akan tahan. Pasti dia tidak akan cukup uang untuk bisa menjaga kesehatan masyarakat," ujar Budi.

Ia mengakui kebijakan ini memiliki dimensi politik tinggi dan berpotensi memicu resistensi publik. Namun menurutnya, kenaikan iuran merupakan mekanisme yang lebih adil karena selama ini defisit pembiayaan banyak ditutup subsidi negara.

Melalui skema Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah merancang pembagian beban iuran berdasarkan kelompok ekonomi. Masyarakat desil 1-4 akan ditanggung pemerintah pusat, desil 5-6 oleh pemerintah daerah, sementara penyesuaian iuran terutama menasar kelompok mampu pada desil 7-10. "Itu sebabnya kenapa kenaikan iuran menjadi instrumen yang lebih adil, yang harus diperjuangkan," kata Budi.

Dalam pengarahannya kepada direksi dan dewan pengawas baru BPJS Kesehatan, ia menegaskan sektor kesehatan memiliki biaya tinggi dan sensitivitas politik besar. Tanpa kontrol dari sisi pembayar, biaya layanan akan sepenuhnya



dikendalikan penyedia layanan. "Yang namanya kesehatan ini secara politis tinggi nilainya. Kedua, dia sangat mahal. Kalau tidak ada bapak-bapak, naik terus harganya," ujarnya.

Ia juga membandingkan besaran iuran dengan pengeluaran rutin masyarakat. "Orang beli rokok saja sudah lebih dari Rp 42 ribu per bulan.

Masa dia nggak mau bayar BPJS Rp 42 ribu atau naik menjadi Rp 50 ribu sampai Rp 60 ribu sebulan? Ini memang sudah saatnya harus naik," kata dia.

Selain iuran, pemerintah menyoroti penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai upaya memenuhi cakupan layanan

kesehatan universal. Budi menilai standar fasilitas perlu diperbaiki, mengingat kondisi ruang kelas III di sejumlah daerah masih belum layak. "Masuk kelas tiga, ada yang 6 hingga 8 orang, kamar mandinya di luar, kotor, panas. Nah itu yang dengan KRIS kita bikin standar minimal, empat tempat tidur, kamar mandi di dalam, ada AC," ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan penyesuaian iuran juga datang dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia mengaku sebelumnya kerap menolak usulan kenaikan iuran, namun kini menyatakan setuju. "Ini karena Ramadan atau karena apa, semua yang disampaikan Pak Menkes setuju saya," tuturnya. (wid,dtc,ist/dya)

Dirut Baru BPJS Kesehatan Jelaskan Polemik 11 Juta Peserta PBI Non-aktif

PRIHATI Pujowaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, memberikan penjelasan terkait pemutakhiran data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat menuai kritik masyarakat. Sebanyak sekitar 11 juta peserta dilaporkan mendadak non-aktif. Penonaktifan ini didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku 1 Februari 2026.

"Berdasarkan data Keputusan Mensos 24/HUK/2026, dari 106.153 peserta, sebanyak 1.145 telah berhasil diaktifkan kembali melalui mekanisme reaktivasi PBI JK," ujar Prihati dalam sambutannya di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, "Sebanyak 102.921 peserta telah direaktivasi, sementara 2.087 lainnya tidak diproses karena berbagai alasan, termasuk meninggal dunia, telah berpindah pekerjaan, atau belum melakukan reaktivasi untuk menjadi peserta mandiri."

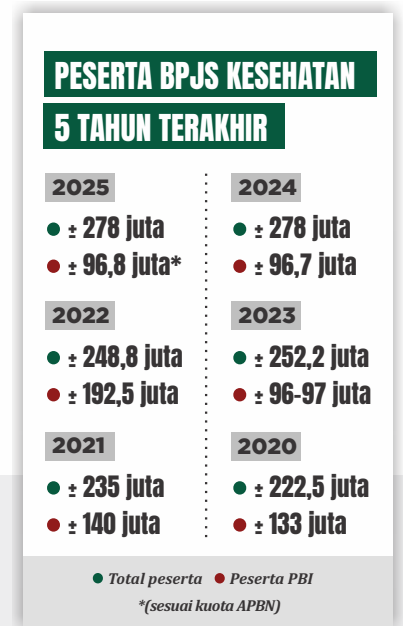
Prihati menyampaikan bahwa

BPJS Kesehatan kini tengah berkoordinasi dengan Kemenko PM, Kemensos, BPS, dan Kemendagri untuk menangani 11 juta peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan. "Kami berharap segera menerima daftar peserta PBI yang akan dibayarkan. Pembayaran dilakukan setelah ada surat resmi dari Mensos," jelasnya.

Dirinya juga menekankan perlunya pendekatan proaktif dalam sosialisasi kepada peserta sebelum penonaktifan dilakukan. "Mungkin ke depannya istilah 'peserta nonaktif' bisa diganti menjadi 'peserta peralihan status', agar tidak terlihat seolah BPJS menonaktifkan peserta. Hal ini juga mendorong peserta untuk segera memperbarui status-nya. Jika tidak, peserta memang akan nonaktif, tetapi istilah 'nonaktif' membuat BPJS terlihat berdampak langsung," ujarnya menutup.

Berikut versi yang lebih fokus ke Gus Ipul, tetap mempertahankan fakta dan kutipan:

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyoroti gelombang kritik



yang diterima Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul beberapa pekan lalu, terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Pernyataan ini disampaikan Budi dalam forum Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Senin (23/2/2026).

Budi menjelaskan, pada awal Februari 2026, Gus Ipul menonaktifkan sekitar 11 juta peserta PBI sebagai bagian dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial menggunakan Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini memicu protes publik yang masif, bahkan sampai viral di media sosial. "Pas kebijakan penonaktifan PBI Gus Ipul keluar, dihajarnya seperti apa, kan saya lihat," kata Budi.

Ekonomi Nasional (DTSEN). Kebijakan ini memicu protes publik yang masif, bahkan sampai viral di media sosial. "Pas kebijakan penonaktifan PBI Gus Ipul keluar, dihajarnya seperti apa, kan saya lihat," kata Budi. (wid,tmo/dya)

LAPOR JET PRIBADI

DALAM 30 HARI, MENAG BEBAS JERAT GRATIFIKASI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar tidak terancam sanksi pidana terkait penerimaan fasilitas jet pribadi dari pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang. Status itu diberikan setelah Nasaruddin melaporkan dugaan gratifikasi tersebut dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi Arif Waluyo menyatakan pelaporan dilakukan sebelum batas 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.

“Pak Menag menyampaikan sebelum 30 hari kerja selesai. Sesuai dengan Pasal 12C juga disampaikan bahwa apabila kurang dari 30 hari kerja, di situ artinya Pasal 12B-nya tidak berlaku,” ujar Arif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Senin (23/2/2026).

Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana bagi penyelenggara negara yang menerima gratifikasi terkait jabatan, dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Namun Pasal 12C memberikan pengecualian apabila penerima melaporkan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan.



Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mendampingi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/2/2026), untuk memberikan penjelasan terkait penggunaan pesawat khusus saat kunjungan kerja ke Sulsel. (ist)

Arif menjelaskan laporan Nasaruddin masih dalam tahap verifikasi dan analisis. Menteri Agama memiliki waktu 20 hari kerja untuk melengkapi dokumen jika diperlukan. Setelah laporan dinyatakan lengkap, KPK memiliki waktu 30 hari kerja untuk melakukan analisis dan menentukan status fasilitas tersebut.

“Kemudian baru kami sampaikan bahwa nantinya berapa nilai yang

memang harus dikembalikan, atau disetor untuk ke kas negara, gitu. Prosesnya seperti itu,” kata Arif.

Jika hasil analisis menyatakan fasilitas itu merupakan gratifikasi, keputusan mengenai pengembalian nilai atau kompensasi akan dituangkan dalam surat keputusan pimpinan lembaga antirasuah.

Kasus ini berawal dari penggunaan jet pribadi oleh Nasaruddin saat

melakukan perjalanan dinas untuk meresmikan Gedung Balai Sarkiah di Kabupaten Takalar, pada 15 Februari 2026. Fasilitas tersebut disediakan oleh Oesman Sapta Odang melalui yayasan yang mengelola fasilitas keagamaan dan pendidikan itu.

Nasaruddin menjelaskan penerimaan fasilitas dilakukan karena keterbatasan penerbangan reguler pada malam hari serta kewajiban kembali ke Jakarta untuk agenda negara. “Sebab jam 11 malam tidak mungkin ada pesawat lagi ke sana dan besok paginya balik lagi karena ada persiapan Sidang Isbat,” ujarnya kepada wartawan. (tin,ist,kum/dya)

TREN PRODUKSI BERAS (2021-2025)

2021
31.33 juta ton

2022
31.54 juta ton
(rekor tertinggi sebelum 2025)

2023
31.10 juta ton
(mengalami penurunan tipis).

2024
30.62 juta ton
(angka tetap BPS).

2025
34.69 - 34.77 juta ton
(meningkat signifikan sekitar 13% dibanding 2024).

PROYEKSI PRODUKSI 2026

Target Pemerintah: Kementerian Pertanian menetapkan target produksi sebesar 34,77 juta ton untuk tahun 2026.

Proyeksi Kuartal I: BPS memperkirakan produksi Januari-Maret 2026 mencapai 10,16 juta ton, naik 15,79% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Proyeksi Internasional: FAO memprediksi angka yang lebih optimis, yakni mencapai 36 juta ton pada musim tanam 2025/2026.



RI Kirim Beras Haji Mulai Akhir Februari

(Ilustrasi) Petugas menata beras di gudang Bulog. Impor untuk kebutuhan haji akan dimulai akhir Februari ini. (Dok)



Pemerintah menyiapkan pengiriman beras premium khusus untuk konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, dengan pengiriman perdana dijadwalkan pada 28 Februari 2026. Kebijakan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Perdana kami kirimkan beras khusus haji sebanyak 2.280 ton pada 28 Februari. Nanti kita akan launching dan kami kirimkan,” kata Zulkifli

Hasan.

Ia menyatakan pengiriman tersebut dimungkinkan setelah Indonesia mencapai swasembada beras pada 2025 dan memiliki cadangan nasional yang dinilai mencukupi. Menurut dia, stok beras yang dikelola Perum Bulog diperkirakan melampaui 4 juta ton tahun ini.

“Karena insya Allah tahun ini stok beras Bulog akan lebih dari 4 juta tahun ini, dan kita sudah swasembada, jadi sudah seharusnya jemaah haji kita

juga bisa mengonsumsi beras dari kita,” ujarnya.

Pengiriman dilakukan dalam dua tahap. Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan gelombang pertama berangkat pada 28 Februari 2026 dan gelombang kedua pada 3 Maret 2026. “Yang akan kami berangkatkan, kami rencanakan 28 Februari 2026 untuk gelombang pertama, sedangkan gelombang keduanya nanti 3 Maret 2026,” kata Rizal.

Pengangkutan dilakukan melalui jalur laut dengan estimasi perjalanan sekitar 1 bulan 1 minggu hingga paling lama 45 hari menuju Jeddah. Bulog menyiapkan dua kapal untuk mengurangi risiko logistik selama perjalanan.

“Estimasi perjalanan dari Indonesia sampai ke Jeddah Arab Saudi itu paling cepat 1 bulan 1 minggu. Paling lambat ya 45 hari. Nanti kami bagi 2 supaya tidak terlalu penuh kapalnya dan kita menjaga kalau ada apa-apa di jalan. Kita masih punya cadangan 2 kapal,” ujarnya.

Menurut Rizal, pengiriman tahap awal diprioritaskan untuk konsumsi

petugas haji yang datang lebih dulu ke Arab Saudi. Sumber beras berasal dari Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog.

Kebijakan ekspor beras untuk kebutuhan jemaah haji juga dilatarbelakangi pertimbangan preferensi konsumsi. Zulkifli Hasan menilai beras basmati yang selama ini digunakan catering haji di Arab Saudi kurang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. “Karena jemaah kita lebih suka beras yang teksturnya lembut dan lebih pulen. Kalau beras basmati itu kan kering, lebih pera, orang Indonesia kurang suka biasanya,” ujarnya. (wid ant/dya)

Proyek Jalan Rp14,9 M Siap Dimulai, Relokasi Pasar Gadang Ditarget Tuntas Maret 2026



Relokasi Pasar Induk Gadang Ditarget Tuntas Maret 2026, Proyek Jalan Rp14,9 Miliar Siap Dimulai

MALANG - Relokasi pedagang Pasar Induk Gadang ditargetkan tuntas pada Maret 2026. Ini seiring dimulainya, proyek perbaikan senilai Rp14,9 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Hari ini saya mengecek progres dari lokasi relokasi Pasar Induk

Gadang. Karena saat ini pedagang sudah berjanji setelah Lebaran Idul Fitri 2026 ini pedagang akan segera pindah. Ini harus saya pastikan," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui usai meninjau langsung p r o g r e s p e m b a n g u n a n tempat relokasi, Senin (23/2/2026).

Dijelaskannya, realisasi proyek perbaikan jalan sangat bergantung pada kesiapan lahan di sisi selatan pasar. Menurut Wahyu, DAK

yang telah ditetapkan pemerintah pusat baru dapat diproses ke tahap lelang setelah area pasar lama benar-benar kosong.

"DAK yang sudah ditetapkan untuk pembangunan perbaikan jalan di Pasar Gadang ini hanya menunggu kesiapan lahan saja. Kalau lahannya

yang sekarang ini sudah terbongkar, pindah semua ke sini, baru nanti akan proses pelelangannya," tegasnya.

Wahyu menyebutkan, nilai anggaran yang dialokasikan untuk proyek pembangunan jalan tersebut mencapai Rp14,9 miliar. Dan akan digunakan untuk peningkatan kualitas jalan di kawasan Pasar Gadang. Yang selama ini kerap dikeluhkan karena kepadatan dan kondisi infrastruktur.

Dijelaskannya, desain perbaikan jalan nantinya mencakup pembangunan dua jalur dengan median di tengah. Selain itu, trase jalan akan dibuat lurus dan terintegrasi dengan jembatan yang sudah ada, guna memperlancar arus lalu lintas di kawasan selatan Kota Malang.

Terkait progres relokasi, Wahyu memastikan pembangunan lapak di lokasi baru ditargetkan rampung sebelum Idul Fitri 2026. Saat ini, pembangunan di sisi timur telah selesai, sementara sisi barat dalam tahap penyelesaian.

"Kita lihat sendiri, yang sebelah timur sudah selesai, tinggal yang sebelah barat. Insyaallah sebelum Idul Fitri sudah selesai," katanya.

P e m i n d a h a n p e d a g a n g

dijadwalkan mulai H+7 Idul Fitri 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pedagang sudah menempati lokasi relokasi paling lambat Maret 2026, sehingga pembongkaran area lama dapat segera dilakukan. "Maret itu harus sudah pindah semua," kata Wahyu.

Dalam kesempatannya ini, Wahyu menjelaskan pembangunan tempat relokasi dilakukan secara swadaya oleh pedagang. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, menurutnya hanya memfasilitasi penyewaan lahan sebagai lokasi sementara.

"Pembangunan tempat relokasi ini murni swadaya pedagang. Kami memberikan fasilitasi menyewakan lahan untuk relokasinya. Karena saat itu mereka memilih swadaya sendiri dibanding pindah ke Terminal Hamid Rusdi," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menambahkan lebih dari 1.200 pedagang akan menempati tempat relokasi tersebut. Saat ini, Eko mengatakan progres pembangunan relokasi telah mencapai 55%. (Santi/Dya)

Produksi Sampah di Kabupaten Malang Diperkirakan Naik 5 Persen/Hari saat Ramadan

MALANG - Produksi sampah di Kabupaten Malang selama Ramadan 2026 diperkirakan mengalami kenaikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memproyeksikan kenaikan sampah sekitar 5 persen per hari dibandingkan hari normal. Proyeksi tersebut berdasarkan tren peningkatan volume sampah pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya.

"Normalnya, rata-rata 1.094 sampai 1.100 ton sampah per hari. Kalau Ramadan diperkirakan bertambah lima persen per hari, atau sekitar 54 sampai 55 ton tambahannya," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) DLH Kabupaten Malang, Dedik Tri Basuki, Senin (23/2/2026).

Dengan demikian, menurutnya selama Ramadan volume sampah harian di Kabupaten Malang berpotensi mencapai lebih dari 1.150 ton per hari. Perhitungan tersebut mengacu pada data produksi sampah Ramadan tahun sebelumnya yang

menunjukkan tren peningkatan meski tidak terlalu signifikan.

Dedik mengatakan, jenis sampah yang mendominasi selama Ramadan adalah sampah organik. Peningkatan konsumsi makanan, khususnya saat berbuka puasa dan sahur, menjadi faktor utama bertambahnya volume sampah.

"Sisa makanan dan takjil. Kebanyakan dari rumah tangga dan sebagian kecil dari pasar-pasar," katanya.

Meski terjadi kenaikan, Dedik menilai peningkatan sebesar 5 persen masih dalam batas terkendali. Namun demikian, DLH tetap melakukan langkah antisipatif agar tidak terjadi penumpukan sampah, terutama di tingkat Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, terdapat 257 lokasi pengelolaan sampah yang tersebar di wilayah tersebut. Rinciannya terdiri atas 212 TPS dan 45 Tempat Pengolahan

Sampah Terpadu (TPST).

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, mengatakan pihaknya akan meningkatkan intensitas pengangkutan sampah selama Ramadan guna mengimbangi potensi kenaikan volume harian.

"Misalnya kalau seminggu itu tujuh kali, nanti bisa ditambah delapan kali. Jadi untuk Ramadan ini sebenarnya kegiatan rutin yang ditingkatkan intensitasnya," ujar Dzulfikar.

Pria yang akrab dengan sapaan Avi tersebut mengatakan, saat ini DLH Kabupaten Malang menyiagakan 65 kendaraan pengangkut sampah dan 244 personel untuk memastikan layanan pengangkutan tetap berjalan



Ilustrasi: Petugas di Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. (dok. DLH Kab Malang)

optimal selama Ramadan.

Selain penguatan armada, DLH juga terus melakukan pengurangan beban di tempat pemrosesan akhir. Sejak 22 Desember 2025, pihaknya rutin mengirim refuse derived fuel (RDF) dari TPA Paras ke pabrik milik Semen Indonesia. (Santi/Dya)

PERANG DI DEPAN MATA, IRAN-AS BERENCANA BERUNDING LAGI

Dunia kembali diliputi ketegangan. Saat Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah dan Iran melontarkan ancaman balasan dari Teheran, kedua negara dijadwalkan kembali berunding di Jenewa pada Kamis, 26 Februari 2026. Putaran baru negosiasi nuklir ini dipandang sebagai kesempatan terakhir untuk menahan laju eskalasi sebelum konflik terbuka pecah.

Konfirmasi jadwal perundingan disampaikan Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, yang kembali memainkan peran sebagai mediator tidak langsung antara dua negara yang telah lama bermusuhan. "Dengan senang hati saya konfirmasi bahwa negosiasi AS-Iran dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada Kamis ini," tulis Albusaidi, sebagaimana dikutip Reuters Swin (23/2/2026).

Namun diplomasi berlangsung di bawah bayang-bayang kekuatan militer. Washington meningkatkan kehadiran militernya di kawasan, termasuk pengerahan kapal induk terbesar dunia USS Gerald R. Ford yang bergabung dengan USS Abraham Lincoln. Kehadiran dua kelompok kapal induk, jet tempur, pesawat pengebom, dan pesawat pengisian bahan bakar menempatkan Iran dalam jangkauan serangan langsung.

Presiden Donald Trump menegaskan opsi militer tetap terbuka.



Latihan militer gabungan antara Iran dan Rusia berlangsung Kamis pekan lalu di Teluk Oman. (dok.Iranian Army/rtr)

Ia mengakui tengah mempertimbangkan serangan terbatas apabila Iran tidak mencapai kesepakatan terkait program nuklirnya. "Saya kira saya bisa mengatakan saya sedang mempertimbangkannya," ujar Trump kepada wartawan.

Pernyataan itu direspons keras Teheran. Juru bicara Kementerian Luar

Negeri Iran, Esmail Baqaei, menegaskan setiap serangan—termasuk yang berskala terbatas—akan dipandang sebagai tindakan agresi. "Serangan apa pun akan dianggap sebagai tindakan agresi. Titik. Dan negara mana pun akan bereaksi terhadap tindakan agresi sebagai bagian dari hak inherennya

AKAR KONFLIK IRAN-AS

- **Kudeta 1953:** AS membantu menggulingkan PM Iran untuk mengamankan kontrol minyak.
- **Revolusi 1979:** Jatuhnya Shah yang pro-Barat dan lahirnya Republik Islam yang anti-AS.
- **Krisis Sandera:** Pendudukan kedubes AS di Teheran selama 444 hari yang memutus hubungan diplomatik.
- **Isu Nuklir & Proksi:** Perselisihan terkait ambisi nuklir Iran dan pengaruh milisi dukungan Iran di Timur Tengah.

UPDATE TERBARU (FEBRUARI 2026)

- **Ultimatum Trump:** AS memberikan tenggat waktu (deadline) hingga akhir Februari bagi Iran untuk menyepakati perjanjian nuklir baru yang lebih ketat atau menghadapi serangan militer.
- **Pengerahan Militer:** Armada besar AS, termasuk kapal induk dan pesawat tempur, sudah bersiaga di Teluk Persia.
- **Negosiasi Buntu:** Pertemuan di Jenewa pekan lalu belum mencapai kesepakatan. Putaran penentuan dijadwalkan pada Kamis, 26 Februari 2026.



untuk membela diri dengan ganas," kata Baqaei dalam pengarahannya di Teheran.

Di tengah tekanan militer dan ancaman terbuka, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya siap menghadapi segala kemungkinan, namun tetap melihat "sinyal menggembirakan" dari jalur diplomasi yang kembali dibuka.

Sumber-sumber diplomatik menyebut Iran menawarkan konsesi signifikan dalam perundingan. Teheran bersedia mengurangi tingkat pengayaan uranium, dengan syarat Amerika Serikat mencabut sanksi ekonomi dan mengakui hak Iran untuk menjalankan program nuklir untuk tujuan damai.

Iran juga mempertimbangkan pengiriman separuh cadangan uranium yang telah diperkaya ke luar negeri sebagai bentuk jaminan komitmen.

Di sisi lain, Washington menuntut penghentian total kemampuan Iran memproduksi senjata nuklir dan ingin memasukkan program rudal balistik Iran ke dalam paket kesepakatan. Diketahui tuntutan itu selama ini ditolak Teheran.

Di dalam pemerintahan Amerika Serikat sendiri, diskusi mengenai opsi militer terus berlangsung. Dalam pertemuan di Situation Room Gedung Putih, Trump membahas rencana serangan terarah terhadap target Iran, mulai dari markas Korps Garda Revolusi Islam hingga fasilitas nuklir dan situs terkait program rudal balistik. (rtr;gus;ist/dya)

Indonesia Siapkan Opsi Evakuasi WNI

KEMENTERIAN Luar Negeri Indonesia memantau ketat kondisi warga negara Indonesia di Iran seiring meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Teheran. Langkah antisipatif dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump kembali menegaskan ancaman serangan terhadap Iran dalam beberapa hari ke depan.

Pelaksana tugas Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, menyampaikan pemerintah terus berkoordinasi dengan KBRI Teheran untuk memantau situasi keamanan dan kondisi WNI.

"Terkait keberadaan WNI di Iran, KBRI Teheran senantiasa memantau dan menjalin komunikasi aktif dengan para WNI," kata Heni dalam pernyataan tertulis, Senin (23/2/2026).

Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada laporan warga Indonesia yang menghadapi ancaman langsung. "Hingga saat ini, tidak

terdapat laporan WNI yang menghadapi ancaman langsung maupun situasi yang membahayakan keselamatan," ujarnya.

Menurut Kemlu, kondisi di Teheran dan sejumlah kota lain masih terpantau normal dan relatif kondusif. Status Siaga 1 untuk Iran yang diberlakukan sejak Juni 2025 tetap dipertahankan sebagai langkah kewaspadaan.

Pemerintah juga telah mengimbau WNI untuk mempertimbangkan meninggalkan Iran secara mandiri apabila kondisi keamanan di wilayah tempat tinggal mereka memburuk. Meski demikian, skenario darurat tetap disiapkan.

"Semua plan contingency tetap siap siagakan termasuk berbagai opsi jalur evakuasi apabila dibutuhkan," kata Heni.

Kemlu juga meminta seluruh WNI meningkatkan kewaspadaan, mengikuti perkembangan situasi, serta menjaga komunikasi dengan KBRI Teheran.

Langkah Indonesia sejalan dengan sejumlah negara lain yang telah lebih dulu mengeluarkan imbauan perjalanan.

Beberapa negara Eropa serta India meminta warga mereka meninggalkan Iran di tengah eskalasi keamanan. Pekan lalu, Kedutaan Besar India di Teheran meminta seluruh warganya, termasuk pelajar dan wisatawan, segera keluar menggunakan penerbangan komersial yang masih tersedia.

Eskalasi terjadi setelah Washington mengancam akan meluncurkan serangan militer untuk menekan Iran agar menyepakati pembatasan program nuklirnya. Sejumlah sumber menyebut Trump mempertimbangkan serangan dalam waktu dekat sebagai tekanan politik. Jika tuntutan tidak dipenuhi, opsi serangan yang lebih besar disebut tetap terbuka, termasuk upaya menggulingkan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. (gus;rls;ist/dya)

Cek! Hal Baik yang Terjadi pada Tubuh Selama Berpuasa

Puasa di bulan Ramadan tidak hanya ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesehatan. Puasa membuat tubuh beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Anda perlu tahu apa yang dapat terjadi pada tubuh saat puasa 12 jam. Apalagi, di Indonesia durasi puasa bisa mencapai 13 hingga 14 jam.

Puasa selama 12 jam atau lebih, tubuh akan masuk ke fase adaptasi metabolik yang berbeda dari biasanya. Saat tidak ada makanan dan minuman yang masuk dalam rentang waktu panjang seperti dari fajar hingga petang, tubuh tidak langsung lemas, tetapi

justru mulai mengatur ulang sumber energinya.

Sistem hormon, kadar gula darah, hingga cara tubuh membakar lemak akan mengalami perubahan bertahap. Pada jam-jam awal, tubuh masih berada dalam fase pascamakan.

Seiring waktu berjalan, cadangan energi dari makanan terakhir mulai habis, sehingga tubuh beralih ke sumber energi alternatif. Proses ini akan melibatkan penurunan insulin, penggunaan cadangan gula di hati, hingga pembakaran lemak.

Pada saat yang sama, organ pencernaan mendapatkan waktu istirahat dan beberapa mekanisme perbaikan alami di tingkat sel mulai aktif.

Kadar gula darah mulai stabil

Metode puasa 12 jam secara alami menghilangkan kebiasaan makan larut malam. Dengan membatasi waktu makan, asupan kalori harian bisa berkurang tanpa perlu aturan diet yang terlalu ketat.

Pengurangan kalori secara bertahap ini dapat membantu penurunan berat badan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Karena metodenya tidak ekstrem, sehingga banyak orang yang merasa lebih mudah mempertahankannya dalam jangka panjang.

Penurunan berat badan

Metode puasa 12 jam secara alami menghilangkan kebiasaan makan larut malam. Dengan membatasi waktu makan, asupan kalori harian bisa berkurang tanpa perlu aturan diet yang terlalu ketat.

Pengurangan kalori secara bertahap ini dapat membantu penurunan berat badan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Karena metodenya tidak ekstrem, banyak orang yang merasa lebih mudah mempertahankannya dalam jangka panjang.

Proses perbaikan sel mulai aktif

Puasa memicu proses alami di dalam tubuh seperti autophagy, yaitu ketika sel membersihkan dan mendaur ulang komponen yang rusak. Proses ini penting untuk menjaga fungsi sel tetap optimal.

Dengan memberi jeda makan selama 12 jam, tubuh mulai mendapatkan sinyal untuk menjalankan proses pemeliharaan ini. Perbaikan sel ini juga dapat menurunkan risiko beberapa penyakit kronis.

Sistem pencernaan beristirahat

Memberi jeda 12 jam tanpa asupan memungkinkan migrating motor complex (MMC) bekerja optimal. MMC adalah gelombang aktivitas pencernaan yang membantu membersihkan sisa makanan dan bakteri dari usus halus. Proses ini membantu mengurangi kembung, sehingga akan memperbaiki kenyamanan pencernaan, dan menjaga

kesehatan usus.

Kualitas tidur berpotensi meningkat

Jika puasa 12 jam dilakukan dengan makan malam lebih awal, tubuh tidak akan lagi sibuk mencerna makanan saat waktu tidur. Energi tubuh bisa lebih difokuskan pada proses pemulihan.

Tidur terasa lebih nyenyak dan detak jantung mendapatkan istirahat yang lebih stabil saat tidak makan terlalu dekat dengan waktu tidur.

Peradangan berkurang

Sejumlah penelitian menunjukkan, pembatasan waktu makan dapat membantu menurunkan peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis diketahui berkaitan dengan berbagai penyakit seperti tekanan darah, kadar kolesterol, dan penanda inflamasi.

Dengan memberi waktu istirahat pada sistem metabolisme, tubuh memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan kembali respons inflamasi.

Meski demikian, hasil pada setiap orang bisa berbeda tergantung kondisi kesehatan, pola makan, dan gaya hidup. Penting untuk tetap memperhatikan kualitas makanan dan memastikan asupan gizi tetap seimbang.

Puasa selama 12 jam bukan sekadar menahan lapar. Ini adalah cara sederhana memberi tubuh waktu untuk mengatur ulang metabolisme, memperbaiki sel, dan menjaga keseimbangan energi secara alami. (Ella -Mahasiswa UINSA, berkolaborasi dalam tulisan ini)

Tips Jaga Berat Badan saat Bukber

1. Kendalikan porsi saat berbuka

Rasa lapar sering bikin makan berlebihan. Jangan jadikan bukber ajang balas dendam, apalagi terlalu sering makan di restoran atau hotel.

2. Awali dengan buah & minuman tanpa gula

Buah membantu menahan lapar sebelum makan besar. Pilih air putih atau teh hangat, hindari minuman manis karena tinggi kalori dan kurang mengenyangkan.

3. Terapkan piring makan sehat

Isi setengah piring dengan sayur rendah kalori. Pilih nasi putih atau merah tanpa digoreng dalam porsi kecil, hindari gorengan dan camilan.

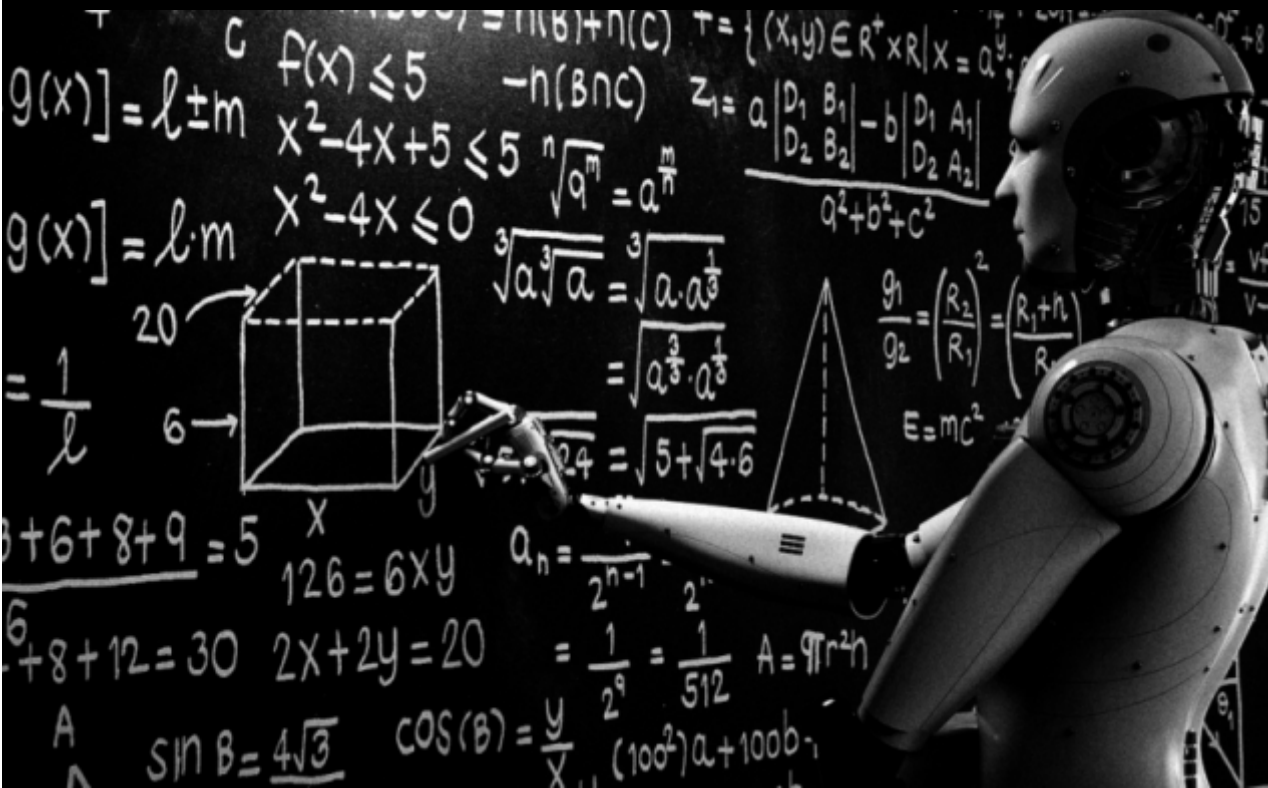
4. Pilih protein rendah lemak

Protein bikin kenyang lebih lama. Pilih dada ayam tanpa kulit, ikan tidak digoreng, pepes, atau daging bakar tanpa lemak.

5. Batasi santan & bumbu kacang

Santan dan bumbu kacang tinggi kalori. Konsumsi sedikit dan jangan disiramkan ke nasi atau makanan.

AI Catat Sejarah Baru, Pecahkan Soal Matematika Tingkat Tinggi



adanya lompatan besar dalam kemampuan AI dibandingkan generasi sebelumnya. Ia menyebut model yang digunakannya telah berada pada tingkat yang sangat maju dan mampu membantu proses penalaran matematis secara lebih sistematis.

Perkembangan serupa juga dicatat oleh Terence Tao melalui laman GitHub miliknya. Ia mengamati bahwa dalam beberapa waktu terakhir,

AI semakin menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang sebelumnya dianggap terlalu kompleks untuk ditangani oleh sistem kecerdasan buatan.

Meski demikian, keberhasilan ini tidak sepenuhnya berdiri di atas kemampuan penalaran bahasa alami GPT-5.2 semata.

Dalam eksperimen tersebut, Somani juga memberikan dukungan berupa alat bantu formalisasi matematika yang berfungsi untuk memverifikasi setiap langkah perhitungan,

sekalius memastikan bahwa hasil akhir yang diberikan AI benar secara logis dan matematis. Dengan kata lain, AI tidak bekerja sendirian, tetapi dikombinasikan dengan sistem verifikasi formal agar hasilnya lebih akurat dan dapat dipercaya. (Nabilla - Mahadisea UINSJ berkontribusi dalam tulisan ini)



Kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) kembali mencatatkan sejarah baru tahun ini. Untuk pertama kalinya, teknologi AI dilaporkan mampu membantu memecahkan soal matematika tingkat tinggi yang selama puluhan tahun menjadi tantangan besar bagi para ilmuwan.

Kemampuan tersebut ditunjukkan oleh model kecerdasan buatan terbaru milik OpenAI, GPT-5.2.

AI ini disebut berhasil menyelesaikan salah satu persoalan dalam daftar Erdos, sekumpulan masalah matematika yang terkenal sangat sulit dan telah lama menjadi

bahan kajian para matematikawan dunia. Eksperimen ini bermula dari uji coba yang dilakukan Neel Somani, seorang insinyur perangkat lunak.

Ia mencoba menguji sejauh mana kemampuan matematika model AI tersebut dengan memberikan soal yang tergolong kompleks dan terbuka. Setelah membiarkan AI melakukan proses penalaran selama sekitar 15 menit, Somani dikjutkan oleh hasil yang diberikan. Model AI itu mampu menghasilkan solusi yang koheren dan masuk akal untuk persoalan yang selama ini sulit dipecahkan.

Hasil pemecahan masalah tersebut kemudian divalidasi oleh

Terence Tao, matematikawan senior dan peraih Fields Medal, yang dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dunia matematika modern.

Tokoh tersebut dikenal sebagai salah satu figur paling berpengaruh dalam dunia matematika modern.

Validasi yang diberikan menjadi poin penting yang memperkuat klaim bahwa hasil kerja AI tersebut tidak sekadar bersifat spekulatif, melainkan memiliki dasar matematis yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Somani menilai bahwa pencapaian ini menunjukkan



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MEDIA TERVERIFIKASI

Catat! Beda Cara Keringkan Sepatu Kulit dan Sneakers

Musim hujan menghadirkan persoalan kecil yang kerap berujung merepotkan yaitu sepatu basah. Di tengah aktivitas yang menuntut mobilitas, hujan deras, genangan air, hingga banjir membuat alas kaki mudah lembap, berbau, dan tidak nyaman digunakan.

Sepatu bukan sekadar pelengkap penampilan, melainkan penopang kenyamanan sekaligus kepercayaan diri saat beraktivitas. Karena itu, ketika sepatu terendam air, persoalannya bukan hanya estetika, tetapi juga fungsi.

Banyak orang yang ingin mengeringkan secara instan, dengan cara dijemur langsung di bawah matahari atau didekatkan ke sumber yang panas.

Cara ini bukanlah cara yang efektif dan bisa merubah bentuk sepatu, lem terkelupas, warna memudar, hingga material rusak permanen.

Sepatu memiliki karakter yang berbeda. Sneakers dengan bahan kanvas atau mesh membutuhkan perawatan yang tidak sama dengan sepatu yang berbahan kulit yang tentunya lebih sensitif.

Jika terjadi kesalahan saat mengeringkan sepatu menyebabkan risiko bau tak sedap, dan bisa memperpendek usia sepatu.

Agar sepatu tetap awet, nyaman, dan tetap tampil maksimal meskipun melawati hujan dan banjir, penting sekali mengetahui cara mengeringkan sepatu yang tepat dengan jenisnya.

Melalui cara yang sederhana dan benar, sepatu bisa kembali kering dan tidak merusak bentuk dan kualitasnya. Berikut cara untuk mengeringkan sneakers dan sepatu kulit dengan cepat dan aman yang dilansir dari beberapa sumber.

Mengeringkan Sneakers yang Basah

Sneakers yang biasanya menggunakan material kanvas, mesh, atau kombinasi sintetis yang relatif lebih fleksibel, tetapi tetap membutuhkan perawatan yang khusus.

Bersihkan dari Kotoran Sejak Awal

Jika Sneakers terkena air banjir, di bilas terlebih dahulu menggunakan air bersih untuk menghilangkan lumpur dan sisa kotoran. Gunakan sikat yang lembut agar material tidak cepat rusak.

Melepas tali dan insole

Melepaskan tali dan insole membantu agar sirkulasi udara berjalan agar lebih baik dan bisa mempercepat proses pengeringan.

Insole yang lembap sering menjadi penyebab utama munculnya bau tak sedap.

Isi bagian dalam dengan menggunakan kertas atau handuk

Masukkan koran, tisu tebal, atau handuk kecil ke dalam sepatu yang basah. Bahan-bahan ini berfungsi menyerap air dari bagian dalam sepatu sehingga proses pengeringan menjadi lebih cepat. Selain itu, cara ini juga membantu menjaga bentuk sneakers agar tidak cepat mengempis atau berubah saat mengering.

Angin-anginkan, jangan dijemur langsung

Hindari sepatu dari paparan sinar matahari langsung karena panas berlebih dapat membuat warna sneakers memudar dan lem perekatnya cepat rusak. Sebaiknya, angin-anginkan sepatu di tempat yang teduh dengan sirkulasi udara yang baik agar kering secara perlahan dan lebih aman untuk material sepatu.

Gunakan kipas angin untuk hasil yang lebih praktis

Agar pengeringan lebih merata dan cepat, letakkan sneakers di depan kipas angin atau air purifier yang memiliki fitur "laundry". Aliran udara dari kipas membantu menguapkan sisa air tanpa memberikan panas berlebih yang berisiko merusak bahan sepatu.

Cara Mengeringkan Sepatu Formal Berbahan Kulit

Sepatu berbahan kulit membutuhkan perawatan ekstra karena materialnya sensitif terhadap panas tinggi dan air berlebihan. Penanganan yang kurang tepat bisa membuat kulit menjadi kaku, retak, atau berubah tekstur.

Lap, tidak boleh disiram

Jika sepatu kulit terkena hujan atau cipratan air, cukup lap permukaannya menggunakan kain kering dan bersih. Hindari menyiram sepatu dengan air karena dapat merusak tekstur kulit serta membuat kelembapannya sulit hilang.

Keringkan secara alami

Letakkan sepatu di ruangan yang memiliki sirkulasi udara baik dan biarkan mengering secara alami. Jangan menjemur sepatu kulit di bawah sinar matahari langsung atau meletakkannya dekat sumber panas karena dapat menyebabkan kulit mengeras dan retak.

Gunakan shoe tree atau kertas

Masukkan shoe tree kayu atau kertas ke dalam sepatu untuk membantu menyerap sisa kelembapan di bagian dalam sekaligus menjaga bentuk sepatu tetap rapi selama proses pengeringan.

Diamkan sampai kering sebelum dipoles

Pastikan sepatu benar-benar kering sebelum dipoles. Setelah kering sempurna, aplikasikan shoe cream atau leather conditioner agar kelembapan alami kulit kembali terjaga dan sepatu tetap terlihat bersih serta mengkilap. (Itqiyah Mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



Bersihkan dari Kotoran Sejak Awal



Melepas tali dan insole



Isi kertas atau handuk



Menjemur Sepatu



Isu Liar Minimarket ...dari hal 1

Ketua Komisi V di DPR RI, Lasarus, menegaskan lembaganya tidak pernah mengusulkan penutupan gerai Alfamart dan Indomaret. "Saya sampaikan dan bisa disaksikan lewat rekaman rapat antara Komisi V DPR RI dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup. Kesimpulan rapat juga akan kami lampirkan sebagai bukti dokumen resmi," ujarnya dikutip Senin (23/2/2026).

Ia menyebut unggahan media sosial yang menampilkan dukungan DPR terhadap penutupan ritel modern sebagai hoaks dan tendensius. "Sekali lagi saya sampaikan, Instagram yang beredar dengan tulisan 'DPR DUKUNG MENTERI DESA TUTUP ALFAMART-INDOMARET DEMI KOPERASI DESA' adalah berita hoaks dan tendensius."

Lasarus menjelaskan, pandangannya dalam rapat berangkat dari keluhan pedagang kecil di desa yang kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern. Ia mengusulkan pembatasan ekspansi minimarket hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, bukan penutupan total. "Saya menyampaikan pemikiran supaya Alfamart dan Indomaret cukup sampai kabupaten dan kecamatan saja. Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun memberi kesempatan kepada pedagang sembako serta BUMDes atau koperasi desa," katanya.

Menurutnya, penataan sebaran ritel dimaksudkan untuk membuka ruang distribusi bagi pelaku ekonomi lokal tanpa menutup usaha yang telah beroperasi.

Pernyataan pembatasan itu berkaitan dengan dinamika pembahasan dalam rapat kerja Komisi V bersama Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam forum tersebut, Yandri menyampaikan pandangan bahwa ekspansi ritel modern berpotensi menghambat kemandirian ekonomi desa. "Saya setuju sekali di forum terhormat ini, kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop," ujarnya.

Ia menilai dominasi puluhan ribu gerai ritel modern menciptakan ketimpangan yang berpotensi mengancam koperasi desa. "Buat apa kita membangun Kopdes, tapi Alfamart sama Indomaret atau sejenisnya merajalela? Ya itu artinya ya tidak apple to apple sebenarnya," katanya. Menurut Yandri, keberpihakan kebijakan diperlukan agar koperasi desa tidak kalah oleh kekuatan modal besar.

Dalam rapat yang sama, Lasarus mendorong pemerintah menyiapkan

peta jalan penataan ritel modern di wilayah desa. "Jadi, saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini, seperti apa nanti kita pemerintah mengambil ini," ujarnya.

Ia juga mengingatkan kebijakan penataan ritel akan menghadapi resistensi pelaku usaha besar. "Tentu saya yakin, Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar ya," katanya. Arah yang disorot, menurutnya, adalah keseimbangan antara penguatan ekonomi desa dan kepastian berusaha.

Klarifikasi tambahan datang dari internal parlemen. Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah, menegaskan bahwa kabar tersebut tidak tepat.

MH Said Abdullah menekankan bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau mencabut izin usaha ritel modern. Kewenangan tersebut sepenuhnya berada pada ranah eksekutif, termasuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta kementerian teknis terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM maupun Kementerian Perdagangan.

"Perlu kami tegaskan, DPR RI tidak pernah mengambil keputusan untuk menutup usaha ritel modern mana pun. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Soal izin usaha dan operasional

perusahaan adalah kewenangan pemerintah sebagai pelaksana undang-undang," ucap Said Abdullah, pada Senin (23/2/2026).

Legislator yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa wacana tersebut muncul dari diskursus mengenai penguatan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa. Dalam sejumlah rapat kerja dan forum resmi, berkembang aspirasi agar koperasi desa diberi ruang tumbuh yang lebih besar di tengah persaingan usaha.

Namun demikian, diskursus tersebut bukanlah keputusan formal DPR, melainkan bagian dari pembahasan kebijakan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

Secara nasional, pemerintah terus mendorong penguatan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja. Sementara itu, pengembangan koperasi desa menjadi bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.

Dalam konteks itulah muncul gagasan agar ekosistem usaha di desa lebih berpihak pada pelaku usaha

lokal. Namun Said Abdullah menegaskan, penguatan koperasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mematikan usaha lain.

"Kita membangun ekonomi desa secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Koperasi harus diperkuat, UMKM harus didorong naik kelas, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum dan iklim investasi tetap harus dijaga. Ekonomi Pancasila mengajarkan keseimbangan, bukan pertentangan," tegasnya.

Lebih lanjut, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan, DPR memiliki fungsi pembentukan undang-undang, penganggaran, dan pengawasan. DPR tidak memiliki kewenangan teknis untuk mencabut izin usaha atau menutup perusahaan swasta.

Said Abdullah juga menegaskan bahwa sikap DPR selama ini adalah mendorong harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah agar koperasi desa berkembang secara sehat dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Ibu Ketua DPR RI konsisten menjalankan fungsi kelembagaan secara konstitusional. Tidak pernah ada kebijakan DPR yang bersifat sepihak atau di luar kewenangan konstitusi. Kita semua berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik," katanya. (wud,ant,ist/dya)

Pengusaha: Jadikan Mitra Bukan Kompetitor

KETUA Umum Asosiasi Global Ritel Indonesia (AGRI), Roy N Mandey, meminta jaringan ritel modern tidak menjadikan Koperasi Desa Merah Putih sebagai kompetitor. Hal ini ia nyatakan merespons rencana pembatasan operasional ritel modern ketika KDMP beroperasi sepenuhnya.

Menurut Roy, saat diposisikan sebagai kompetitor, ritel modern serta KDMP bakal saling berupaya untuk bersaing menggaet hati masyarakat.

"Ritel modern dan koperasi ini seharusnya tidak diposisikan sebagai kompetitor. Kalau kompetitor itu bisa saling meniadakan," ucap Roy, Senin (23/2/2026).

Roy menilai ritel serta Koperasi Merah Putih seharusnya diposisikan sebagai mitra. Dengan demikian, proses distribusi kebutuhan dinilai bakal semakin merata. Selain itu, dengan kemitraan tersebut, pertumbuhan ekonomi disebut akan semakin meningkat.

"Harusnya sebagai mitra antara ritel modern dengan Koperasi Desa ini, dalam memperluas jaringan distribusi dan memperkuat ekonomi

nasional. Nah, itu ada manfaat bersamanya. Itu posisi yang rasional, tidak kontroversial, punya posisi masing-masing," urai dia.

Roy turut mengingatkan, ritel modern memberikan kontribusi besar kepada negara. Salah satunya, yakni melalui penyerapan tenaga kerja yang terus bertambah setiap tahun.

Kemudian, ritel modern juga menyediakan kestabilan pasokan serta kestabilan harga, meski ada momen besar di Indonesia. Contohnya, momen Ramadhan maupun Lebaran.

"Kita tahu di saat sekarang ini menjelang Lebaran atau saat Ramadhan, yang namanya ketersediaan barang dan kestabilan harga pasti ada di ritel. Barang itu kita siapkan dari jauh-jauh hari, sudah ada di gudang kita, dan itu semuanya tentunya menjamin akan ketersediaan barang dan kestabilan harga," tutur dia.

Di satu sisi, Roy mengaku mendukung program KDMP yang digagas sebagai instrumen untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Ia berharap pemerintah dapat

menerapkan kebijakan yang seimbang antara pelaku usaha ritel modern dengan keberadaan KDMP.

"Perlu ada balance antara mengedepankan instrumen ekonomi kerakyatan dan juga tetap menjaga atau me-maintain terhadap hasil atau peran daripada ritel modern selama ini," sebut Roy.

Sebagai informasi, sinyal pembatasan ritel juga sempat disampaikan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin dalam agenda Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa di Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

Saat itu, ia menyebutkan, jaringan ritel modern membunuh usaha kecil milik masyarakat maupun perekonomian di desa. Imin turut menyatakan sejumlah merek dagang minimarket yang dinilai membunuh usaha kecil serta perekonomian di desa.

"Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita Bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM," ucapnya. (wid,ist,kum/dya)



WARGA GUNUNG ANYAR KELUHKAN GUBUK DAN TUMPUKAN SAMPAH DI TEPI JALAN LAILA MUFIDAH: JELANG LEBARAN, TAPI LINGKUNGAN TAMPAK KUMUH

WARGA Gunung Anyar Harapan, Kecamatan Gunung Anyar, Surabaya, mengeluhkan kondisi akses utama menuju permukiman mereka yang dinilai kumuh dan tidak tertata. Di tepi jalan terdapat gubuk dengan peneduh seadanya. Di dalamnya terdapat kasur, bantal, serta berbagai barang bekas alias rongsokan. Warga menyebut gubuk tersebut sesekali dihuni.

Selain keberadaan gubuk, tepi jalan menuju Perumahan Gunung Anyar Harapan, RW 05 juga dipenuhi tumpukan rongsokan. Sampah plastik hingga pakaian terlihat dijemur terbuka di sepanjang sisi jalan. Kondisi itu dinilai mengganggu kenyamanan warga sekaligus merusak estetika lingkungan permukiman.

"Kasih warga Gunung Anyar Harapan. Ini akses utama mereka menjadi kumuh, apalagi menjelang Lebaran," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Laila Mufidah saat meninjau lokasi.

Laila menilai kondisi tersebut bukan persoalan baru dan telah berlangsung cukup lama. Ia mengatakan penanganan perlu dilakukan secara terkoordinasi antara pemerintah kota dan pihak pengembang kawasan agar akses menuju hunian warga tidak terganggu oleh aktivitas penumpukan maupun penjemuran sampah.

Politikus dari PKB itu menekankan kebersihan kawasan merupakan kebutuhan dasar warga yang harus dijamin, terlebih pada periode menjelang Hari Raya.

Diketahui, akses utama menuju permukiman berada tidak jauh dari TPS Rungkut Menanggal. Di lokasi tersebut terdapat plakat berlogo Pemkot dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya. Namun warga menyebut operasional pengelolaan TPS dilakukan pihak ketiga.

Ketua RT 04/RW 05 Gunung Anyar Harapan, Nendra Yuniar Putra, mengatakan warga tidak mempersoalkan siapa pengelola fasilitas tersebut. Warga, kata dia, hanya menghendaki lingkungan yang bersih dan tertata.

"Bagi warga, siapa pun pengelolanya, yang penting keberadaan sampah tidak mengganggu



kenyamanan," ujar Nendra.

Menurut dia, salah satu persoalan yang dikeluhkan warga adalah lambatnya proses pengangkutan sampah. Aktivitas pengangkutan umumnya baru tuntas sekitar pukul 09.00 WIB, sementara sejak pagi hari warga telah menggunakan akses tersebut untuk berangkat kerja dan sekolah.

Diakuinya memang ada aktivitas penjemuran plastik dan penumpukan rongsok di tepi jalan. Keberadaan puluhan gerobak sampah di sekitar area TPS turut dinilai mengganggu akses dan pemandangan kawasan.

Warga berharap pemerintah kota melakukan penertiban, termasuk dengan melibatkan Satpol PP Surabaya, guna memastikan tidak ada aktivitas penumpukan atau penjemuran sampah di tepi jalan utama permukiman.

Laila menyatakan akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah untuk memastikan penanganan segera dilakukan. Penanganan, kata dia, perlu mencakup percepatan pengangkutan sampah, penertiban aktivitas di sekitar TPS, serta kejelasan tanggung jawab

pengelolaan kawasan.

"Kita harus mencari solusi bersama. Jika itu kewenangan pengembang, harus diselesaikan. Jika kewenangan pemerintah kota, perlu ditertibkan. Warga tidak seharusnya menyambut Lebaran dalam kondisi lingkungan kumuh," ujar Laila.

Kejanggalan Penerapan Denda

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah juga menemukan kejanggalan saat meninjau TPS Rungkut Menanggal. Berdasarkan keterangan petugas di lapangan, pengelolaan pembuangan sampah di lokasi tersebut menerapkan ketentuan volume minimal.

"Kami menggali data di lapangan dengan bertanya langsung kepada petugas. TPS itu harus menghasilkan 8 ton sampah. Jika kurang, dikenai denda atau cas (tambahan biaya, red)," kata Laila.

Laila menduga pengelolaan TPS berada di bawah pihak ketiga, bukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya maupun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

Meski demikian, pada papan petunjuk lokasi tercantum logo Pemkot Surabaya beserta nama dinas terkait. Ia menyatakan akan memastikan kembali status pengelolaan tersebut.

Keanehan lain, kata Laila, adalah cakupan layanan TPS yang tidak terbatas pada wilayah sekitar. Sampah dari berbagai kawasan, termasuk dari pelaku usaha seperti restoran, disebut turut dibuang di lokasi itu. Ia juga menemukan kendaraan khusus yang membawa sampah dari luar wilayah.

Pimpinan DPRD tersebut mendesak pihak terkait memprioritaskan kenyamanan warga di sekitar TPS. Ia menyoroti kondisi jalan utama yang dipenuhi sampah dan rongsok serta puluhan gerobak yang diletakkan di tepi jalan. Menurut Laila, perlu disediakan lahan khusus untuk penempatan gerobak sampah agar tidak mengganggu akses permukiman. Ia meyakini pemerintah kota dapat melakukan intervensi sesuai tugas pokok dan fungsi dengan tata kelola yang sesuai aturan. (adv,ama/dya)



Kita harus mencari solusi bersama. Jika itu kewenangan pengembang, harus diselesaikan. Jika kewenangan pemerintah kota, perlu ditertibkan. Warga tidak seharusnya menyambut Lebaran dalam kondisi lingkungan kumuh."

LAILA MUFIDAH

Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya